



SUMBER BERITA:

Harian Rakyat Bengkulu

KATEGORI BERITA:



POSITIF



NETRAL



NEGATIF

Inspektorat *Warning* OPD Soal Tindak Lanjut Audit BPK

ARGA MAKMUR - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bengkulu Utara menjadi peringkat terbaik dalam tindak lanjut rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun ini atas audit pengelolaan APBD 2023 lalu.

Namun masih ada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang belum tuntas melaksanakan seluruh rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan tersebut.

Inspektur Inspektorat Daerah, Nopri Anto Silaban, SE mengingatkan seluruh OPD untuk menyelesaikan seluruh rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan tersebut.

Apalagi ini sudah memasuki akhir tahun anggaran 2024, sehingga masing-masing OPD sudah harus mempersiapkan laporan pelaksanaan program dan penggunaan anggaran 2024.

"Sebagian besar rekomendasi dari Badan Pemeriksa Keuangan sudah dituntaskan sesuai dengan rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan, namun masih ada yang belum tuntas dan kita minta untuk segera menyelesaikan hasil rekomendasi," terangnya.

Ia juga menyampaikan jika dengan tuntasnya tahun anggaran 2024, maka Inspektorat juga mengingatkan seluruh organisasi perangkat daerah terkait dengan penggunaan anggaran.

Baik itu program pengadaan barang dan jasa, maupun kegiatan internal masing-masing organisasi perangkat daerah seperti perjalanan dinas.

"Setiap sistem pelaporan juga harus berpedoman dengan aturan, sehingga apa yang wajib dilengkapi oleh OPD sebagai pelaksana anggaran harus benar-benar sesuai dengan aturan," terangnya.

Tak hanya untuk organisasi perangkat daerah, ia juga mengingatkan seluruh kepala desa untuk menyelesaikan pertanggungjawaban anggaran.

Inspektorat 2025 mendatang akan kembali melakukan audit rutin ke desa terkait pelaksanaan dana desa 2024 mendatang.

Inspektorat sudah memetakan beberapa kegiatan yang memang kerap terjadi kesalahan dalam pengelolaan dana desa.

Selain terkait pembayaran pajak, pelaksanaan pembuatan pelaporan dan realisasi anggaran nonfisik juga menjadi catatan inspektorat untuk dilakukan pemeriksanaan dalam audit 2025 mendatang.

Termasuk pengelolaan atau belanja dana bantuan keuangan pemerintah daerah ke pemerintah desa.

Tahun ini, desa-desa menerima dana bantuan keuangan dari Pemda Bengkulu Utara yang digunakan untuk pembelian motor dinas.

"Dalam sistem pelaporan juga desa-desa harus melengkapi karena ada pengadaan kendaraan dinas dari dana bantuan keuangan tersebut, dalam sistem pelaporan atau pertanggungjawaban pemerintah desa juga harus melengkapi dan akan menjadi objek pemeriksaan kita 2025 mendatang," terangnya. (qia)